

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Almaududi, 2020, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum*, Padang, Gedung Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Amir MS, 2016, *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Asmaeny Azis Izlindawati, 2018, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers.
- Borni Kurniawan, 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bayu Surianingrat, 1985, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta, Akasara Baru.
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*. Jakarta, PT. Rhineka Cipta.
- Departemen Pertanian. 2004. *Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2005-2006*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Ginandjar Kartasasmitha, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta, Pusaka Cisendo.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga
- Ibrahim Dt. Sanggoeno, 2010, *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapan.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Moch Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang, Setara Press.
- Musyair Zainudin, 2008, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Philipus M Hadjon, 2007, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Pers.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Rajawali Pers.
- R Subekti, 1992, *Hukum Desa dan Administrasi Pemerintahan*, Bandung, Alumni.
- Salmadani, et.al. 2003, *Adat Basandi Syarak, Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, Padang, Kartini Indah Lestari
- Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sri Handini Sukesni dan Hartati Kanti Astuti, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka
- Srilaksmi NKT, 2020, "Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), hlm. 30-38.
- Syamsir Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung, Alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendampingan Desa.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Liku di Kecamatan Ranah Pesisir.

Peraturan Nagari Sungai Liku Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

WAWANCARA

Darmawan, Wali Nagari Sungai Liku.

Juma Asri, Ketua Badan Musyawarah Nagari Sungai Liku

Joni Ardi, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

Amrizal, Pendamping Desa Pemberdayaan

Anton, Pendamping Lokal Desa, Nagari Sungai Liku

JURNAL DAN SKRIPSI

- Aliyani N, 2021, “Strategi Percepatan Pembangunan Desa Berkembang, Upaya Menuju Desa Mandiri yang Berkelanjutan”, *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*.
- Afdhal Mahatta , 2012, “Eksistensi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, Thesis, Jakarta, Universitas Indonesia
- Barniat Z, 2018, “Otonomi Desa, Konsep Teoritis dan Legal”, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 25.
- Budiman S, 2022, “Pendampingan Pengelolaan Modal Usaha Dari Dana Zakat Pada UMKM Kelurahan Tajur Bogor”, *Where Theory, Practice, Experience & Talent Meet, TPeT*, 2(1), 20.
- Siti Nurjanah, 2023, “Pentingnya Sertifikasi dan Pelatihan untuk Tenaga Pendamping Desa”, *Jurnal Manajemen Pembangunan*, Vol. 8, No. 1, 24.
- Rafli Rinaldi, 2018, “Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Ta Gulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 4.
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I, No. 6.
- Agus Santoso, 2019, “Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Indonesia”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 15, 120.
- Srilaksmi NKT, 2020, “Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum”, Pariksa, *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 30.
- Irfan Thahir, 2020, “Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri, Studi di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima”, *Edu Sociata, Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, 38.

INTERNET

- Ali Ahmad, “Regulasi Tugas Pendamping Desa”, Website Pemerintah Desa, Dapat diakses dari <http://www.example.com>. Diakses pada 21 Juli 2024.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, “Tugas dan Fungsi, ”bpsdm.kemendesa.go.id, Dapat diakses dari, <https://bpsdm.kemendesa.go.id>, Diakses pada 29 Juli 2024.
- Badan Pusat Statistik, “Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan”, Dapat diakses dari, <https://bps.id/kecamatan-ranah-pesisir-kabupaten-pesisir-selatan>, Dikunjungi pada 30 Juli 2024.

BPS Kabupaten Pesisir Selatan. 2023, “Data Statistik Tahun 2023”, Pesisir Selatan: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, <https://bps.id/kecamatan-ranah-pesisir-kabupaten-pesisir-selatan>, Diakses pada 25 juli 2024.

“Otonomi Daerah, “Pengertian, Tujuan, Indikator, Asas dan Faktor Pendukung”, Kajian Pustaka, www.kajianpustaka.com, Diakses pada 24 Juni 2024.

